

## Perlawanan tak kunjung padam: adat, agama, dan resistensi terhadap kolonial dalam *Sitti Nurbaya*

Fatimatuz Zuhroh<sup>1</sup> | Annisa Qurrotun Nada<sup>2</sup> | Firda Ulfi Taufiqoh<sup>3</sup> | Siti Khumairotul Lutfiyah<sup>4</sup> | Siti Asmaul Husna<sup>5</sup> | Muhammad Khodafi<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Sejarah  
Peradaban Islam  
UIN Sunan Ampel Surabaya

<sup>2</sup>Program Studi Sejarah  
Peradaban Islam  
UIN Sunan Ampel Surabaya

<sup>3</sup>Program Studi Sejarah  
Peradaban Islam  
UIN Sunan Ampel Surabaya

<sup>4</sup>Program Studi Sejarah  
Peradaban Islam  
UIN Sunan Ampel Surabaya

<sup>5</sup>Program Studi Sejarah  
Peradaban Islam  
UIN Sunan Ampel Surabaya

<sup>6</sup>Program Studi Sejarah  
Peradaban Islam  
UIN Sunan Ampel Surabaya

### Correspondence:

Fatimatuz Zuhroh  
Program Studi Sejarah  
Peradaban Islam  
UIN Sunan Ampel Surabaya  
ftmtzzuhroh@gmail.com

### Article History:

Received 05 November 2021  
Revised 31 August 2022  
Accepted 08 September 2022

### Abstract

*The belasting* (tax) policy outside Java as a solution to the failure of *culturstelsel* and ethical politics during the Dutch colonial period was in fact contrary to the Plakat Pajang agreement in Sumatra which then triggered the resistance of the Minangkabau people. The story of the resistance of the Minangkabau people known as the Kamang War (1908) is not only recorded in document records or history books, but is also recorded in a literary work, namely the novel *Sitti Nurbaya*. Based on these problems, it will be formulated, what is the lineage of radicalism in the Minangkabau society in the 19th century? What are the causes of the resistance of the Minangkabau community in *Sitti Nurbaya*? How was the resistance of the Minangkabau people to the Dutch colonial? This study places *Sitti Nurbaya (Kasih Tak Sampai)* as the object of study and aims to describe and explore the condition of the Minangkabau people in the colonial era and the resistance of the Minangkabau people to the Dutch colonialism. This study uses the documentation method with the New History approach. The results of this study include three things, namely: the emergence of Minangkabau society's radicalism is the impact that Minangkabau recognizes as the axis of Islamic meetings that gave birth to prominent religious figures, the cause of the Minangkabau community's resistance in *Sitti Nurbaya*, namely the Dutch refusal of the Plakat Pajang agreement after the fall of the Padri defense, Minangkabau people's resistance to Dutch colonialism was found in the form of weapons and non-weapons (verbal) resistance as a form of defense of their cultural and national identity.

**Keywords:** Resistance, *Culturstelsel*, Minangkabau, Dutch Colonial, *Sitti Nurbaya*

### Abstrak

Kebijakan *belasting* di luar Jawa muncul sebagai akibat tidak langsung penghentian praktik *culturstelsel* yang memberikan banyak keuntungan pada pihak pemerintah kolonial. Dalam konteks Minangkabau kewajiban pajak perorangan itu bertentangan dengan isi perjanjian Plakat Pajang yang mengikat antara pihak Belanda dengan masyarakat Minangkabau. Tak ayal kebijakan itu memicu gelombang perlawanan rakyat Minangkabau. Resistensi masyarakat setempat lantas memuncak pada sebuah peristiwa akbar yang dalam sejarah sosial dikenal sebagai Perang Kamang (1908). Kronik tentang penolakan pajak tersebut tidak hanya terekam dalam dokumen sejarah formal, dalam roman *Sitti Nurbaya* (1922) Marah Roesli menjadikan heroisme masyarakat Minangkabau sebagai latar melodrama yang melibatkan Samsul Bahri dan Datuk Meringgih dalam sebuah pertikaian. Artikel ini membahas genealogi radikalisme masyarakat Minangkabau sejak abad XIX hingga awal abad XX, muasal resistensi sebagaimana digambarkan dalam narasi roman *Sitti Nurbaya*, serta bentuk resistensi masyarakat setempat menghadapi kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Dalam tulisan roman gubahan Marah Roesli ditempatkan sebagai objek telaah dengan maksud hendak mendeskripsikan kondisi masyarakat Melayu kala itu serta resistensi rakyat Minangkabau terhadap kolonial Belanda. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan pendekatan *New Historism*. Hasil kajian ini mencakup tiga hal, yakni munculnya radikalisme masyarakat Minangkabau (gerakan Paderi) merupakan imbas dikenalnya Minangkabau sebagai poros pembaharuan Islam yang melahirkan tokoh-tokoh ulama terkemuka; penyebab resistensi masyarakat Minangkabau dalam *Sitti Nurbaya* yang berkenaan dengan perjanjian Plakat Pajang pasca tumbanganya pertahanan Paderi; dan resistensi masyarakat Minangkabau terhadap pemerintah kolonial ditemukan dalam bentuk resistensi senjata dan nonsenjata (verbal) sebagai bentuk pertahanan identitas budaya dan bangsa mereka.

**Kata Kunci:** Resistensi, *Culturstelsel*, Minangkabau, Kolonial Belanda, *Sitti Nurbaya*

## Pendahuluan

Siti Nurbaya (1922) dapat dikategorikan sebagai prosa termasyhur (untuk tidak dikatakan terbaik) yang diterbitkan *Balai Pustaka* pada masa prakemerdekaan. Roman yang digubah Marah Rusli tersebut menceritakan kehidupan masyarakat Minangkabau masa kolonial pada pergantian abad XX. Pertentangan adat-tradisi *vis a vis* cita-cita kemodernan menjadi narasi utama karya yang mengekspos pelbagai aspek sosiologis, politis, nasionalisme dan sebagainya pada masyarakat Melayu Minangkabau (Aveling, 1970; Faruk, 1986; Foulcher, 2008; Teeuw, 1967). Subtansi penceritaan erat kaitannya dengan kehidupan masa kolonial yang diinspirasi pencerahan pencerahan Eropa (Jedamski, 1992; Johns, 1959; Labrousse, 1982). Dalam representasi cerita, kolonialisme Eropa digambarkan sebagai pihak yang memiliki ketertarikan untuk menduduki wilayah Indonesia yang tidak hanya terpusat di Jawa, melainkan wilayah luar Jawa seperti Sumatera. Keteritikan ini dilatarbelakangi pulau-pulau di Nusantara merupakan penghasil lada, kopi, tebu, nila yang menjadi komoditas primadona di pasar Eropa (Hall & Reid, 1994; Hefner, 2017). Namun seiring munculnya ancaman kerajaan Inggris serta penaklukan Belanda oleh Napoleon, VOC merasa perlu mengamankan pulau-pulau sekitar, utamanya Sumatera (Ricklefs, 2011).

Penggambaran kisah serta tokoh dalam karya dikisahkan dengan nuansa realisme yang romantis. Dalam narasi kisah sosok seperti Siti Nurbaya, Samsul Bahri, Baginda Sulaiman, Sutan Mahmud, Datuk Maringgih, Putri Rabiah dan sebagainya mewakili gambaran riil masyarakat Minangkabau yang dipilah menjadi golongan tradisional (orang tua) dan modern (orang muda). Kemalangan dan kesialan yang terutama dialami Siti Nurbaya dan Samsul Bahri mewakili representasi golongan muda yang 'tercemar' pencerahan rasional Eropa. Namun

yang menarik keberadaan beberapa tokoh di atas tidak bisa dikatakan hanya memerankan satu sikap saja. Kompleksitas penokohan roman Marah Roesli tampak, misalnya, pada Samsul Bahri dan Datuk Maringgih. Di awal Datuk Maringgih digambarkan sebagai jenis manusia laknat, lintah darat. Pria tua bangka ini kerap kali menghalalkan segala macam cara demi memupuk kekayaan pribadi. Salah satunya, sabotase untuk menghancurkan bisnis Baginda Sulaiman, sebagai saudagar paling kaya di Minangkabau. Namun di akhir cerita roman, Datuk Maringgih justru memiliki peran yang luar biasa, yang dalam sudut pandang nasionalisme pasca kemerdekaan, tindakan datuk itu niscaya mulia dan heroik. Sebab ketika gelombang penolakan terhadap kebijakan *belasting* muncul di Minangkabau, Datuk menjadi salah satu aktor paling vokal dan bahkan dia ikut berjuang memerangi utusan pihak penjajah Belanda beserta antek-anteknya (Roesli, 2011).

Berbeda dengan Datuk Maringgih, Samsul Bahri yang semula dicitrakan sebagai pemuda polos, berwawasan luas, dan rasional (seorang calon dokter yang begitu dicintai Siti Nurbaya) justru bermetamorfosis menjadi bagian aktif dari pihak penjajah. Dalam pelbagai aspek sosok Samsu, seperti penggambaran Tickell (2008) tentang pribadi yang dalam dirinya membentuk identitas-identitas hibrida karena perjumpaan dengan pihak kolonial yang tidak terelakkan. Dilihat dari cara berpakaian, bersopan santun, berbahasa, dan berpikir Samsu merepresentasikan apa yang oleh Bhabha (1994) disebut 'mimikri kolonial' yang membentuk pribadi lain yang sudah mengalami reformasi—'seperti orang lain yang sudah mengalamai reformasi, yang bisa dikenali' dalam bentuk kelas baru kawula pribumi dengan kaki tertancap di tanah Eropa maupun tanah pribumi (Tickell, 2008). Kluckhohn menyebut bahwa bahasa, peralatan perlengkapan hidup manusia, sistem mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, kesenian, ilmu pengetahuan, dan

sistem religi sebagai unsur-unsur budaya yang kerap kali ditiru pihak pribumi dari manusia Eropa yang dianggap lebih bermartabat dan beradab (Hartono, 2015). Hal demikian sangat mencolok pada diri Samsu, baik sebelum merantau ke Batavia atau setelah keluar dari Minangkabau. Puncaknya Samsu menjadi bagian dari dinas ketentaraan elite kolonial di Nusantara, seorang perwira *marsose* berpangkat letnan (lih. bab 14).

Sebagai roman yang sepiantas lalu seolah bertutur tentang kasih tak sampai, teks prosa yang digubah Roesli seolah memiliki daya sugestif dalam penggambaran tokoh dan alam budaya Melayu masa kolonial. Dalam penceritaan disinggung pelbagai lika-liku masyarakat Minangkabau di bawah kekangan adat setempat, seperti sistem matrilineal (kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu). Namun dari pelbagai konflik yang disajikan dalam narasi roman, perlawanan masyarakat setempat atas kebijakan *belasting* menjadi sekuel cerita yang menarik untuk dilihat dari perspektif sejarah. Kebijakan pajak perorangan berdimensi jamak. Masyarakat Minangkabau menganggap *belasting* bertentangan dengan tatanan adat *Harato Pusako Tinggi*<sup>1</sup> yang mencakup tanah kepemilikan kolektif dan simbol kesejahteraan keluarga Minangkabau. Pajak perorangan mengharuskan mamak<sup>2</sup> sebagai kepala *harato pusako* membayar upeti kepada pihak kolonial Belanda. Di awal abad XX kebijakan tersebut menimbulkan gelombang protes sosial di Padang, Sumatera Barat (Lionar et al., 2020). Puncaknya huru-hara tidak terhindari dan menyebabkan pertumpahan darah.

Melalui serangkaian peristiwa perlawanan terhadap kolonialisme di masa silam, sangat penting untuk dilakukan upaya rekonstruksi yang bersifat sistematis. Dalam kerja rekonstruksi peristiwa historis, seorang sejarawan perlu memahami rekonstruksi peristiwa sejarah sifatnya dinamis

dan bahkan imajinatif. Ia dapat berubah dari satu orang ke orang lain, satu tempat ke tempat lain, dan dari waktu ke waktu yang lain. Artinya, sejarawan di sini dihadapkan pada keterbatasan dalam merekam serta menafsirkan peristiwa bersejarah (Purwanto, 2001). Dalam keterbatasan yang niscaya, karya sastra hadir sebagai alternatif, setidaknya untuk melengkapi gambaran koheren dari masa silam (Johns, 1959). Kuntowijoyo (2004) menyebut jika penulis kreatif (sastrawan) juga merupakan agen-agen sejarah yang secara langsung dan/atau tidak langsung, sadar dan/atau tidak sadar mengumpulkan serpihan-serpihan kejadian masa lampau yang lantas direkonstruksi ulang. Dalam upaya rekonstruksi, sastrawan berangkat dari insting dan imajinasi. Melalui sebuah karya sastra peristiwa sejarah akan lestari dan mudah diterima.

Dari teks imajinatif yang historis menunjukkan bahwa suatu realitas dari peristiwa masa silam (peristiwa riil sejarah) tidak hanya didapatkan dalam teks-teks formal sejarah. Terkait Sitti Nurbaya sebagai karya sastra historis yang mengekspos fenomena sosial prakemerdekaan telah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain Atikurrahman et al., (2021) yang mengulas sejarah pemberontakan yang meliputi aspek modernitas, *belasting*, dan kolonialisme dalam roman karya Marah Roesli. Atikurrahman dan Ilma (2021) menyinggung pemberontakan dan kematian tokoh dalam Sitti Nurbaya yang menjadi realitas sebagai pihak terjajah yang mengancam keberadaan kolonialisme. Stark & Huzka (2022) mengungkap kritik sosial Marah Rossli sebagai pengarang yang berasal dari Minangkabau terhadap dinamika batin masyarakat Minangkabau. Hartono (2015) menyoroti bentuk mimikri budaya Belanda yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dalam narasi novel, dan Mulyani (2010) yang mengkaji nilai-nilai nasionalisme yang inheren dalam teks novel. Namun dari beberapa kajian tersebut,

didapati celah penelitian yang belum dilakukan secara spesifik, yaitu mengenai bentuk resistensi masyarakat Minangkabau dari perspektif disiplin ilmu sejarah.

Kajian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk resistensi masyarakat Minangkabau melalui representasi roman Sitti Nurbaya. Sekuel cerita Marah Roesli yang menggambarkan peristiwa sejarah masa kolonial terutama terdapat pada Bab 14 hingga Bab 16. Ketiga bab terakhir novel tersebut banyak menarasikan sikap masyarakat Minangkabau yang anti terhadap kebijakan kolonial. Apabila dicermati lebih lanjut sikap anti penjajahan terwujud dalam aksi resistensi baik resistensi fisik maupun nonfisik. Sikap resistensi itu sendiri timbul sebagai aksi mempertahankan identitas bangsa dan budaya.

Pada resistensi nonfisik misalnya, didapati Datuk Meringgih menghasut rakyatnya untuk melawan Belanda. Efeknya masyarakat Minangkabau bertekad dalam melawan kolonial Belanda meskipun terdapat ketimpangan teknis militer antara keduanya. Pada akhirnya Perang Kamang pecah. Sehingga dapat diketahui jika pada saat itu resistensi dilakukan secara terorganisir dan berada di bawah aktor-aktor yang mengepalainya. Berdasarkan penjabaran di atas, kajian ini menguraikan 1) kondisi masyarakat Minangkabau masa kolonial; 2) penyebab resistensi masyarakat Minangkabau terhadap kolonial Belanda; dan 3) bentuk resistensi masyarakat Minangkabau dalam representasi novel Sitti Nurbaya yang dikarang oleh Marah Roesli.

### Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan *new historicism*. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana rangkaian teks memiliki keterkaitan dengan persoalan di zamannya. *New Historicism* mengartikan sastra bukanlah suatu

cerminan transparan dan pasif dari peristiwa historis. Dalam paradigma ini teks sastra juga ikut andil untuk mengembangkan, mengartikulasikan, dan mereproduksi melalui imajinasi kreatif yang dituangkan dalam bentuk verbal (Artika, 2015). Kajian ini mengungkapkan sisi sejarah yang terkandung dalam karya sastra lantas mengkolerasikan peristiwa sejarah tersebut dengan sumber-sumber teks nonsastra dan menggunakan sumber data berupa teks sastra, yakni *Sitti Nurbaya* karya Marah Rusli. Sumber data dari kajian ini yaitu berupa penggalan kutipan novel yang menarasiakan bentuk-bentuk perlawanan masyarakat Minangkabau, serta keadaan sosial, dan budaya masyarakat Minangkabau yang terdapat dalam novel. Beberapa sumber data nonsastra yang relevan juga digunakan dalam kajian ini. Hal tersebut digunakan sebagai sumber data pendukung. Seperti contoh buku-buku maupun jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan topik dengan sejarah pada penelitian ini.

Kajian ini menggunakan metode dokumentasi dalam tahap pengumpulan data. Metode Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data melalui berbagai sumber sejarah. Baik itu karya ilmiah, naskah, kitab, arsip-arsip, majalah, koran, ataupun catatan harian pribadi (Susanto, 2014). Langkah-langkah dalam tahap pengumpulan data meliputi, 1) membaca teks sastra yang memiliki keterkaitan dengan tujuan kajian yang dilakukan, 2) mengumpulkan sekaligus mengklasifikasi korpus-korpus dari teks karya sastra yang paling relevan dengan kajian. Sedangkan analisis data menggunakan beberapa teks nonsastra untuk mengaitkan dengan peristiwa sejarah sebagaimana tertera pada teks sastra. Beberapa langkah analisis data dalam kajian ini, meliputi: 1) melakukan penelusuran sumber nonsastra yang memiliki keterkaitan dengan topik kajian ini, yakni tentang sejarah kolonial dan juga sejarah sosial; 2) analisis

yang digunakan mencakup penyajian data dan pembahasan, dan 3) menyajikan kesimpulan dari hasil analisis sejarah dalam novel Sitti Nurbaya yang telah dilakukan kemudian mengkolerasikannya dengan teks nonsastra yang relevan.

## Hasil dan Pembahasan

### Genealogi Radikalisme Minangkabau Abad XIX

Minangkabau merupakan sebutan untuk sekelompok etnis yang mayoritasnya mendiami wilayah Sumatera Barat. Dalam konteks Revolusi Kemerdekaan, Minangkabau juga dikenal karena melahirkan tokoh-tokoh besar dalam kancah politik nasional pra/pascakemerdekaan. Sejak pertengahan abad XIX, cikal bakal dan prestasi masyarakat Minangkabau dapat dilihat dari cara mereka memberikan tanggapan terhadap kehadiran kolonial Belanda (Graves, 2007). Masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan yang masuk dalam kekerabatan ibu dan mewarisi harta ibunya (Kuncorowati et al., 2018). Terdapat delapan ciri yang menggambarkan sistem matrilineal masyarakat Minangkabau, 1) keturunan dihitung menurut garis ibu; 2) suku terbentuk menurut garis ibu; 3) tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya; 4) pembalasan dendam merupakan suatu kewajiban bagi seluruh sukunya; 5) menurut teori, kekuasaan berada di tangan ibu; 6) yang sebenarnya berkuasa ialah saudara laki-laki; 7) perkawinan bersifat matrilineal di mana suami mengunjung rumah istri; 8) hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya, dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan (Radjab, 1969).

Pada abad XIX Minangkabau merupakan sentra pembaharuan ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan munculnya komunitas pendidikan Islam yang dipelopori oleh Shattariya Tuanku Nan Tua di wilayah Agam. Namun perkembangan Islam di Minangkabau

dihadapkan dengan tantangan kemunculan gerakan Islam konservatif, yaitu gerakan Padri (Darwis, 2013). Eksistensi gerakan Padri tidak terlepas dari peran Tuanku Nan Renceh dan ketiga tokoh haji yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piobang (Nashir, 2008). Kelompok Padri dikenal dengan sikapnya yang militan dalam menanggapi aturan adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Persinggungan antara kaum Adat dan kaum Padri menimbulkan suatu konflik yang berkepanjangan.

Pada 1821 Minangkabau berhadapan dengan intervensi Belanda. Sikap dendam lama kaum adat terhadap perlakuan Paderi membuat kaum adat meminta bantuan kepada kolonial Belanda. Pada tahun yang sama, kaum Adat menandatangani perjanjian dengan Belanda sebagai bentuk kerja sama melawan kaum Paderi. Sejak saat itu dimulai konflik antara Paderi dan Belanda bukan lagi Paderi dengan kaum Adat (Sanusi, 2018). Perang tersebut berlangsung kurang lebih selama 16 tahun dengan kemenangan Belanda atas kaum Paderi dengan jatuhnya wilayah pertahanan terakhir kaum Paderi, yaitu Bonjol. Keberhasilan yang telah diraih Belanda dalam membantu kaum adat Minangkabau menciptakan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut termuat dalam perjanjian Plakat Panjang yang dikeluarkan pada Oktober 1833 oleh Van Sevenhoven, Komisaris Belanda di Sumatera Barat (Lionar et al., 2020).

Bersatunya Belanda dengan masyarakat Minangkabau melahirkan revolusi tatanan pemerintahan baru yang semula dipimpin oleh sebuah kerajaan yang sakral digantikan dengan Gubernur Belanda. Muncul organisasi supranagari, yaitu dewan nagari yang secara teoritis berada dalam naungan kantor Tuanku Laras yang bertugas sebagai kepala adat dan administrasi nagari.<sup>3</sup> Namun pada 1870, akibat tatanan baru pemerintahan Belanda, tatanan berubah sehingga menggeser eksistensi penghulu yang kala itu hukum kriminal



Barat menghapus kekuatan balai sebagai penegak hukum nagari. Menurunnya pamor penghulu dipandang sebagai melemahnya sisi sosial dan terjadinya pergeseran paradigma di Minangkabau.

Setelah perodesasi berakhirnya Perang Paderi, Belanda memberlakukan sistem kerja tanam paksa dan memonopoli pembelian kopi. Hal tersebut membuat masyarakat Minangkabau mengalami kerja rodi dan tidak lagi mengutamakan adat. Masyarakat Minangkabau merasa tak terima dengan perlakuan Belanda. Mereka merasa dicurangi dan dipermalukan dengan aturan tersebut. Pihak Belanda menganggap diri mereka sebagai “penguasa” bukan sebagai “pelindung” Minangkabau. Belanda juga mengingkari isi perjanjian Plakat Panjang tentang pembayaran pajak secara langsung di Minangkabau. Hal tersebut membuat para penghulu kehilangan eksistensinya serta pemimpin tarekat menentang doktrin agama menolak persetujuan terhadap aturan baru yang semula berkembang menjadi pemberontakan setempat. Pemberontakan di plebagai daerah dilakukan untuk mencegah pelanggaran aturan lama lebih jauh lagi. Pemerintah berusaha menekan perlawanan reprensif dan memaksakan program pemungutan pajak (Darwis, 2013).

### Resistensi dalam Roman *Sitti Nurbaya*

Berawal dari perlawanan kaum Padri, para penghulu yang anti Padri meminta bantuan kepada pihak Belanda. Di tahun 1821, keduanya menandatangani suatu perjanjian sebagai bentuk kerjasama. Namun pada 1897 hingga 1908 pihak Belanda melanggar perjanjian tersebut di mana salah satu pelanggaran pemerintah kolonial adalah menerapkan pajak perorangan atau *belasting* kepada rakyat Minangkabau. Kebijakan ini membuat masyarakat Minangkabau kecewa dan melakukan berbagai penolakan terhadap Belanda (Ricklefs, 2011). Akibat penolakan ini, pihak Belanda merespon

dengan melakukan taktik berupa mensosialisasikan kebijakan baru kepada penghulu di Padang. Kemudian kebijakan *Belasting op de bedriften andere inkomste* akhirnya resmi dicetuskan.<sup>4</sup> Namun kebijakan ini justru menimbulkan konflik yang lebih luas. Belanda dianggap telah menyinggung pemuka adat (penghulu) dan pemuka agama (tuanku) di Minangkabau. Pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya pemuka agama dibebaskan dari pembayaran pajak. Hal itu disebabkan para *tuanku* Minangkabau tidak mempunyai penghasilan tetap (Putra, 2010). Alhasil, ketika pemerintah kolonial memaksakan kebijakan tersebut berlaku respon masyarakat Minangkabau tidak bisa dihindar. Pertentangan rakyat setempat semakin meluas dan tidak bisa dihindari oleh pihak Belanda. Dalam roman *Sitti Nurbaya*, Marah Rusli menggambarkan gerakan resistensi dalam realitas sosial masyarakat Minangkabau kala itu. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya resistensi masyarakat Minangkabau dalam *Siti Nurbaya*, antara lain:

Pertama, penerapan kebijakan *belasting* oleh pihak Belanda kepada masyarakat Minangkabau. Sebelum kedatangan Belanda, di wilayah Minangkabau telah berlaku pajak dari kepala pemerintahan adat. Pajak ini diambil dari pedagang keliling yang datang untuk berjualan dan diambil sekedarnya saja. Namun setelah Belanda datang di Minangkabau kondisi berubah drastis, misalnya dalam konteks penetapan pajak yang tinggi (Masyitah et al., 2019). Hal ini digambarkan oleh Marah Rusli dalam novel *Siti Nurbaya* yakni melalui percakapan di antara Engku Datuk Malelo dan Engku Malim Batuah.

“Uang belasting? Uang apa pula itu?” tanya Datuk Malelo dengan senyum merengut. “Ada-ada saja kompeni itu, untuk mencari uang. Dan siapakah yang akan susah karena aturan itu? Tentulah anak negeri juga. Belumkah cukup uang rodi, uang jaga, uang ini dan uang itu? Sekarang ditambah pula dengan uang

belasting? Uang apakah artinya itu, Malim?"

"Uang belasting, yaitu uang pajak harta benda atau pencaharian, dalam setahun-setahun," jawab Malim Batuah.

(Rusli: 342)

Dalam percakapan tersebut Engku Datuk Malelo dan Engku Malim Batuah terlibat percakapan intens mengenai kebijakan pajak perorangan yang diwajibkan pemerintah kolonial terhadap warga setempat. Bagi pemuka Minangkabau itu kebijakan Belanda tersebut akan membawa kerugian bagi masyarakat Minangkabau. Kutipan novel diatas ternyata selaras dengan kondisi nyata di Minangkabau kala itu. Di mana, rakyat Minangkabau merasa keberatan atas pajak baru dari Belanda. Kemudian pada 15 Juni 1908 perlawanan terhadap Belanda akhirnya diluncurkan baik dari kalangan adat, agama, pemuda dan kaum perempuan di Minangkabau. Perlawanan ini disebut dengan perang Kamang. Selain itu, juga terjadi perlawanan lain pada saat yang bersamaan yaitu perlawanan di Manggopoh.

Kedua, pelanggaran Belanda terhadap perjanjian "Plakat Panjang" masyarakat Minangkabau. Perjanjian "Plakat Panjang" merupakan sebuah perjanjian yang dibuat pada 1833. Perjanjian ini disebut dengan *Deklarasi Van De Bosch* yang disampaikan oleh *Van Sevenhoven* Komisaris Belanda di Sumatera Barat. Pada dasarnya perjanjian ini berisikan maklumat bahwa pemerintah Belanda dilarang ikut campur dalam urusan-urusan lembaga adat setempat, dan tidak memberlakukan sistem pajak langsung kepada rakyat (Lionar, 2020). Di sisi lain, perjanjian ini merupakan strategi Belanda untuk menaklukkan Minangkabau. Belanda mulai ingkar janji secara perlahan, sehingga terjadilah suatu perlawanan rakyat Minangkabau terhadap Belanda yang ingin menguasai wilayahnya secara utuh. Dalam Siti Nurbaya dikisahkan melalui

kutipan sebagai berikut:

"Tentang peraturan Gubernemen ini, belum kami ketahui buruk baiknya. Tetapi yang mula-mula terasa dalam hati kami dalam perkara belasting ini, ialah orang Belanda rupanya telah lupa akan janjinya, kepada orang Minangkabau. Bukankah sudah ditetapkan dalam "Pelekat Panjang", bahwa kami anak Minangkabau tak perlu membayar bea, yang sebagai belasting ini? Apakah sebabnya maka kami disuruh juga membayar? Mungkirkah orang Belanda akan janjinya?"

(Rusli: 350)

Kutipan di atas memberikan gambaran bahwa Belanda telah mengingkari janji yang dibuatnya pada Plakat Panjang. Di mana sebelumnya dalam Plakat Panjang Belanda berjanji untuk tidak mengusik kepentingan kaum adat Minangkabau serta tidak memberlakukan pajak perorangan. Namun munculnya kebijakan *belasting* secara tidak langsung dianggap telah mengkhianati perjanjian yang pernah disepakati. Sehingga rakyat Minangkabau hilang kepercayaan terhadap Belanda. Sementara itu, jika kita melihat faktanya memang kondisi yang digambarkan dalam Siti Nurbaya ini sesuai dengan kondisi Minangkabau pada saat itu. Tepatnya pada abad XX, Belanda melakukan berbagai macam campur tangan demi memperluas kekuasaannya dengan memanfaatkan para pegawai pemerintahan dan kalangan elite bangsawan. Adapun bukti dari campur tangan Belanda yaitu banyaknya perusahaan Belanda yang melakukan eksploitasi bahan-bahan mentah dan berbagai macam komoditi sumber daya alam baik di daerah-daerah di Jawa dan luar Jawa (Ricklefs, 2011). Selain itu, Belanda juga terus melakukan pembaharuan terhadap kebijakannya sebagai bentuk kegagalan dari politik Etis misalnya pembaharuan dalam sistem pajak seperti dalam kutipan cerita di atas.

### Bentuk Resistensi Masyarakat Minangkabau

Castells mendefinisikan resistensi sebagai suatu tahap pembentukan identitas yang dilakukan oleh aktor-aktor sosial yang tertekan dikarenakan perlakuan diskriminatif oleh pihak tertentu (Alfaqi, 2015). Sehingga mengakibatkan munculnya upaya pertahanan diri berupa suatu perlawanan yang terstruktur. Dalam hal ini resistensi merupakan upaya yang dilakukan oleh Masyarakat Minangkabau untuk mempertahankan identitas mereka dari kolonialisme. Ashcroft (2013) menjabarkan resistensi menjadi dua macam, yaitu resistensi fisik (radikal) dan resistensi nonfisik (pasif) (Dapit et al, 2020). Dalam resistensi radikal, perlawanan yang dilakukan cenderung bersifat masif. Pada umumnya dilakukan secara berkelompok dan terorganisir dengan dikepalai oleh beberapa tokoh layaknya sebuah pasukan tentara yang bersiap untuk perang. Resistensi semacam itu banyak ditemui pada era penjajahan. Sedangkan resistensi nonfisik (pasif) cenderung bersifat verbal dan muncul dalam pribadi individu atau bahkan kelompok yang berupa ide-ide maupun gagasan untuk mempertahankan identitas dan budaya mereka. Dalam melakukan resistensi pasif perlu pemahaman mengenai seluk beluk sejarah masyarakat secara menyeluruh. Sehingga mampu mempengaruhi suatu kelompok untuk mendukung dan mewujudkan gagasannya tersebut. Dalam hal ini resistensi pada novel Sitti Nurbaya dipetakan menjadi dua bentuk, perlawanan fisik dan non-fisik. Beberapa perlawanan fisik terbagi menjadi resistensi langsung terhadap otoritas Belanda dan juga perlawanan tidak langsung, yakni melalui perantara tokoh yang merepresentasikan budaya Belanda.

### Resistensi Fisik Menentang Pajak

Meletusnya perang di awal abad XX di Sumatera Barat merupakan bentuk perlawanan rakyat terhadap penetapan pajak (*belasting*) yang

dilakukan pihak Belanda. Beberapa daerah yang menentang dan melakukan perlawanan fisik terhadap pemerintah kolonial Belanda adalah daerah Kamang. Kamang merupakan daerah pertama yang melakukan perlawanan sehingga menimbulkan reaksi yang sama di beberapa daerah lain di Sumatera Barat. Pada 15 Juni 1908, pukul Sepuluh malam pasukan Belanda berangkat dari Bukittinggi membelok ke Bukit Ambacang untuk melakukan pengepungan di Kampung. Kira-kira jam 11 malam sampailah induk pasukan tentara Belanda yang dipimpin Westenenk ke Simpang Empat Kampung Tengah dan orang-orang yang ditugaskan untuk ronda malam sudah mengetahui kedatangan tentara Belanda yang kemudian mereka memberikan kode (Masyitah et al., 2019).

“Dengan demikian, gemparlah seluruh Padang Hulu dan Padang Hilir. Di mana-mana kedengaran rusuh dan orang melawan, sebagai mereka telah mupakat lebih dahulu sama-sama hendak berontak”.

(Rusli: 359)

“..Seketika itu juga berbunyilah kira-kira tiga puluh bedil, sekaligus. Tatkala didengar perusuh bunyi bedil ini dan dilihatnya, tiada seorang pun yang kena, bertambah-tambahlah berani mereka, karena pada sangkanya sesungguhnya mereka tiada dimakan anak bedil lagi, berkah ajimat yang diperolehnya dari gurunya. Maka bertempiklah mereka bersorak dan ratib mengucap “*La illaha illallah*” lalu maju ke muka. Setelah hampirlah mereka, barulah Letnan Mas memerintahkan membedilnya”.

(Rusli: 356)

Setelah terjadi perlawanan yang cukup sengit dan korban berjatuhan, suasana sempat sunyi dalam jangka waktu tidak lama. Kemudian perang pecah lagi yang ditandai oleh bunyi terompet dan tembakan pistol serta diiringi suara terompet dari daerah barat. Kilat dari letusan pistol dari pasukan Belanda itu memberikan sinyal kepada pasukan



rakyat di mana posisi dari musuh. Seketika pasukan Belanda yang sudah diberi kode langsung keluar dari jurusan timur dan barat, dari kiri dan kanan. Dari belakang mereka ternyata Dt. Rajo Kaluang mengikuti secara diam-diam. Setelah pasukan musuh sampai di Kampung Tangah Syek Jangguik (Jabang) terdengar suara takbir sebagai komando yang diiringi oleh Dt. Rajo Pangulu bersama laskar pasukan rakyat menyerang pasukan Westenenk sehingga perang kambali tidak dapat dielakkan.

"Dengan segera menjadi ramailah peperangan itu, masing-masing mencari lawannya. Ada yang bertikam-tikaman, ada yang bertetak-tetakan pedang, ada yang tangkis-menangkis, berpukul-pukulan, tangkap-menangkap dan banting-membantingkan. Yang mati, jatuh, yang luka, berdarah, yang takut, lari, yang berani mengejar. Ada yang maju, ada yang mundur, ada yang melompat, berbagai-bagai kelakuan mereka. Suara pun bermacam-macam kedengaran, gegap gempita, tiada disangka bunyi lagi, dicampuri pula oleh bedil, pistol, pedang dan parang".

(Rusli: 366)

Bentuk perlawanan fisik terhadap kolonial Belanda juga digambarkan pada tokoh Datuk Meringgih. Meskipun lebih terlihat pada kepentingan personal, namun tindakan Datuk dianggap telah mengganggu ketertiban keamanan otoritas Belanda. Sebagaimana yang termuat dalam novel ketika Datuk Meringgih, menyuruh suruhannya bernama Pendekar Lima, dan rekan sepermainannya seperti Engku sang tukang cetak (yang akhirnya mati), Baso dsb. untuk mencetak uang. Masing-masing mereka diberi upah oleh Datuk Meringgih untuk membuat uang emas dan perak.

"Hanya sekarang, janganlah terlalu banyak mencetak uang perak, melainkan uang emas itulah yang harus dilebihkan, sebab uang perak, lekas dikenal orang".

(Rusli:126)

Selanjutnya bentuk perlawanan fisik dilakukan Datuk Meringgih yang mana Meringgih berhasrat agar tidak ada orang yang menyaingi kesuksesannya dan kekayaannya. Maka dia menyuruh tangan kanannya, Pendekar Lima untuk membakar toko, gudang dan Pohon Kelapa di Ujung Karang milik Baginda Sulaiman, agar dia jatuh miskin serta bangkrut.

"Bukan aku suruh engkau mencuri barang-barangnya, karena berapakah yang akan terbawa olehmu? Aku bukan bodoh. Aku tahu akal yang lebih baik, yaitu gudang-gudang dan toko-tokonya harus dibakar, perahu yang membawa barang-barangnya dari Painan harus ditenggelamkan dan orang-orang yang ada di sana dibujuk, supaya jangan mau bekerja dengan dia lagi; sekalian pohon kelapanya di Ujung Karang, haruslah diobati, biar busuk dan tak berbuah," kata Datuk Meringgih dengan suara keras, serta memukul-mukul telapak tangan kirinya dengan tangan kanannya, yang dikepalakannya, karena geramnya".

(Rusli:127)

Bagian terakhir, resistensi fisik juga terjadi pada saat Meringgih memergoki Samsu dan Nurbaya yang tengah melanggar norma adat. Dalam hal ini Samsu merupakan tokoh yang pro terhadap budaya Belanda, yang terlihat pada pola pikir dan perilakunya terhadap Nurbaya. Dimana sempat terjadi percekocokan diantara Datuk Meringgih dan Samsulbahri sebelum mereka bertikai. Sebagaimana narasi yang ada, Datuk mengungkapkan jika Samsulbahri adalah sosok pemuda terpelajar yang telah menentang adat. Pendidikan tinggi yang telah ia tempuh, dan sifatnya yang berkemajuan sebagai anak muda justru dianggap telah menghilangkan jati dirinya sendiri sebagai kaum Minangkabau.

"Benar juga pikiran kami kaum kuno, kemajuan kaum muda itu bukan akan meninggikan derajatnya, bahkan akan membawanya dari tempat yang mulia

ke tempat yang hina, membusukkan nama yang harum, menghilangkan derajat dan kemuliaan perempuan, sedang adat dan kepandaian lama yang berfaedah bagi perempuan di sia-siakan”.

(Rusli: 195)

Ungkapan Datuk Meringgih tersebut kemudian dibalas dengan Samsu. Menurutnya Datuk yang bersikap salah karena telah menikahi Nurbaya dengan tabiat busuknya. Mendengar, ujaran Samsu maka Datuk Meringgih tidak terima.

“Merah padamlah muka Datuk, lalu diangkatnya tongkat dan dipalukannya kepada Samsu... Dengan segera Samsu melompat ke hadapan, meninju muka Datuk Meringgih dengan kedua belah tangannya berturut-turut, serta kakinya pun menendang perut lawannya ini, sehingga jatuhlah Datuk Meringgih, terbanting ke tanah, lalu berteriak minta tolong... Seketika itu datanglah seorang berpakaian serba hitam dari tempat yang gelap, memburu Samsu dengan sebilah keris terhunus di tangannya”.

(Rusli: 196)

### Resistensi Nonfisik Menentang Pajak

Dalam hal ini jika dicermati dengan seksama resistensi nonfisik (pasif) dalam *Sitti Nurbaya* dilakukan oleh masyarakat Minangkabau sebelum terjadinya pemberontakan. Hal tersebut direpresentasikan pada perilaku beberapa tokoh pembantu novel dalam bentuk verbal. Seperti yang ditunjukkan pada tokoh Sutan Mahmud dan Rukiah (lih. *Bab 2*). Rukiah yang sangat mempercayai adat melakukan perlawanan nonfisik kepada Sutan Mahmud yang merupakan seorang pegawai pemerintahan yang dipegang Belanda dan tidak terlalu mempercayai adat. Nampaknya Rukiah menyela Sutan Mahmud tersebut karena pekerjaan yang tiada henti sehingga sudah lama sekali Sutan Mahmud tersebut tidak mengunjungi Rukiah dan Rukiah. Dalam ujarannya tersebut, tidak lain terselip

maksud Rukiah agar Sutan Mahmud menyadari kembali adat asalnya.

“Lihatlah! Memang benar sangkaku, pikiranmu telah berubah daripada yang diadatkan di Padang ini...atau telah lupa pula engkau adat nenek moyang kita itu?”.

(Rusli: 21)

Perlawanan nonfisik juga terlihat ketika Ahmad Maulana berbincang-bincang dengan Fatimah (istrinya), Alimah, dan Nurbaya (lih. *Bab 12*). Dalam perbincangan tersebut Sitti Fatimah melakukan perlawanan verbal kepada Ahmad Maulana, suaminya, ketika mengutarakan ketidaksetujuannya dengan Adat Padang seperti berisitri banyak yang dirasa lebih banyak kejahatannya daripada kebajikannya. Menurutnya kejahatan adat Padang tentang istri yang lebih dari satu orang diantara ialah mudah timbulnya perselisihan. Kurangnya cinta kasih sayang antara anak dan ayah karena banyaknya anak. Ketidakadilan pemberian harta (nafkah) kepada istri-istrinya, dan diperbuat sekehendak hati oleh suaminya. Perempuan itu menikah bukan karena akan mengabdikan kepada laki-laki, melainkan karena akan mencari kesenangan juga.

“Ya, tetapi sudah adat kita begitu, bagaimana hendak diubah? Dalam agama kita pun tiada dilarang laki-laki beristri lebih dari seorang. Bila kita beranak laki-laki, alangkah malunya kita, walaupun kita bukan orang berbangsa tinggi sekalipun bila anak kita itu hanya seorang saja istrinya; sebagai orang yang tak laku kepada perempuan”.

(Rusli: 261)

Cuplikan pembicaraan Sitti Fatimah tidak lain untuk mempertahankan apa yang sudah menjadi adat yang tidak bisa ditubuh. Selain itu, Fatimah juga menolak pandangan suaminya bahwa perkawinan dipandang sebagai perniagaan yang

diperhubungkan oleh tali uang atau keturunan yang baik saja dan tidak dipertalikan oleh cinta kasih sayang sebagaimana pada bangsa Barat. Dalam pandangan Fatimah tersebut bangsa Barat tidak lain ialah seorang kafir yang tidak patut untuk diikuti. Hal ini dilakukan Fatimah tidak lain untuk mempertahankan adat nenek moyang zaman dahulu.

“Ya itu betul; tetapi adat kita, pusaka nenek moyang kita, tak boleh disia-siakan atau ditukar-tukar saja. Dan lagi, tak baik kita membuang-buangnya; buruk dan baik harus diturut. Itu tandanya kita beradat. Kalau hendak menambahnya dengan aturan lain, baik, tetapi adat kita, dipakai juga”.

(Rusli: 267)

Menjelang pemberontakan, seperti tampak pada tokoh Engku Datuk Malelo dan Engku Malim Batuah (lih. *Bab 15*), Engku Datuk Malelo melakukan perlawanan dalam bentuk verbal ketika Datuk Batuah memberitahu ia tentang isu pembayaran pajak *belasting*. Datuk Malelo menolak kebijakan Belanda untuk membayar *belasting*. Dalam pandangannya kebijakan pemerintah kolonial nyatanya hanya menyusahkan rakyat pribumi. *Belasting* tidak lain dilakukan hanya untuk kepentingan sepihak yakni pihak Belanda sendiri. Dalam ujarannya tersebut terselip maksud Datuk Malelo untuk mempengaruhi Datuk Batuah agar sepaham dengannya.

“Belanda kekurangan duit rupanya, jadi dicari-carinya akal untuk memperoleh uang. Tetapi perbuatan yang sedemikian, tak boleh dibiarkan. Kalau diturutan saja, cobalah Engku Malim lihat! Sudah ini ada pula lagi uang yang akan dibayar. Di mana kita peroleh sekalian itu? Dan apakah sebabnya maka kita harus membayar uang-uang itu? Karena kita budak, bukan tawanan, bukan pula orang yang membayar upeti kepada kompeni. Dan lagi apakah gunanya uang itu?”

(Rusli: 342)

Selain itu, resistensi pasif dalam *Siti Nurbaya* juga tampak pada reaksi beberapa orang Minangkabau ketika Tuanku Laras, seorang pejabat pemerintahan Minangkabau menyampaikan perihal *belasting*. Dalam rapat yang dikepalai oleh Tuan Laras tersebut, beberapa masyarakat Minangkabau menyampaikan aspirasinya terhadap kebijakan *Belasting*. Dimana mayoritas aspirasi mereka menolak terhadap kebijakan *Belasting*.

“... Orang Belanda sudah lupa pula, bahwa kami bukan orang takluk, yang harus membayar upeti kepada bangsa Belanda. Negeri kami tiada diambil dengan asap bedil, oleh orang Belanda, melainkan dengan perjanjian, antara sahabat dengan sahabat”.

(Rusli: 350)

Cuplikan tersebut, tepatnya pada kata “kami bukan orang takluk” mengindikasikan sikap masyarakat Minangkabau yang ingin mempertahankan identitas dan kedaulatan mereka. Kalimat tersebut seolah-olah menunjukkan jika pada saat itu rakyat pribumi telah merdeka dan bukan negeri yang dengan mudah diinjak-injak oleh para kolonial dengan semena-mena. Namun pernyataan tersebut hanyalah sebagai bentuk perlawanan atas usaha mereka dalam mempertahankan identitas. Mengingat pada 1908 Indonesia belum merdeka dan masih ada dibawah kuasa pemerintah Hindia Belanda.

## Kesimpulan

Pada abad XIX Minangkabau dikenal sebagai poros pembaharuan Islam yang cukup penting. Dalam bidang pendidikan Islam, Minangkabau memainkan peranan penting terhadap lahirnya tokoh-tokoh ulama terkemuka. Pada saat bersamaan juga muncul suatu gerakan agama yang lebih konservatif, yakni gerakan Paderi. Mereka mengecam secara keras pada praktik adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam perkembangannya Paderi tidak hanya

menjadi tantangan bagi kaum adat Minangkabau, tetapi juga bagi otoritas Belanda.

Penyebab utama dari resistensi masyarakat Minangkabau berasal dari sikap Belanda yang mengingkari isi perjanjian Plakat Panjang yang pernah disepakati setelah tumbangnya pertahanan Paderi. Usaha Belanda dalam penerapan *belasting* untuk mengatasi problema ekonomi di tanah jajahan justru menimbulkan pertentangan baru di daerah Minangkabau. Tuntutan pembayaran pajak atas kepemilikan harato pusako tinggi telah menyinggung rakyat Minangkabau karena dianggap menghilangkan identitas sosial-budaya yang melekat dalam adat mereka. Pada bab-bab

terakhir roman *Sitti Nurbaya*, Marah Roesli banyak merepresentasikan bentuk perlawanan yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau di abad XX. Pada narasi penceritaan tragedi Samsu-Nurbaya banyak ditemukan kesesuaian antara teks novel dengan teks sejarah. Sosok seperti Datuk Meringgih sebagai perwujudan aktor sosial yang berperan besar atas aksi resistensi bersenjata masyarakat Minangkabau. Serta didukung dengan resistensi nonsenjata (pasif) masyarakat minangkabau yang begitu anti terhadap kolonial Belanda yang diwujudkan dengan perlawanan verbal sebagai bentuk pertahanan identitas bangsa dan budaya mereka pada saat itu.

## Daftar Pustaka

- Alfaqi, M. Z. (2015). Memahami Indonesia Melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(2).
- Arimbi, D. A. (2014). Finding Feminist Literary Reading: Portrayals Of Women In The 1920s Indonesian Literary Writings. *ATAVISME*, 17(2), 148–162. <https://doi.org/10.24257/atavisme.v17i2.5.148-162>
- Artika, I. W. (2015). Teori dalam pengajaran sastra. *Prasi*, 10(19).
- Ashcroft, B., Griffiths, G., & Tiffin, H. (2013). Post-colonial studies: The key concepts. In *Post-Colonial Studies: The Key Concepts*. <https://doi.org/10.4324/978023777855>
- Atikurrahman, M., & Ilma, A. A. (2021). Talkin Kematian Romantik Yang Berulang: Max Havelaar, Sitti Nurbaya, dan Kolonialisme. In E. Saparudin (Ed.), *Manis Tapi Tragis: Kisah Saijah-Adinda dalam Max Havelaar* (pp. 176–193). Retrieved from <http://repository.uinsby.ac.id/id/eprint/1742/>
- Atikurrahman, M., Ilma, A. A., Dharma, L. A., Affanda, A. R., Ajizah, I., & Firdaus, R. (2021). Sejarah Pemberontakan dalam Tiga Bab: Modernitas, Belasting, dan Kolonialisme dalam Sitti Nurbaya. *SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 3(1). <https://doi.org/10.15642/suluk.2021.3.1.1-22>
- Aveling, H. G. (1970). "Sitti Nurbaja": Some Reconsiderations. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 126(2).
- Bhabha, H. K. (1994). *The Location of Culture*. London: Routledge.
- Dapit, A., Waluyo, P., & Trisari, A. (2020). Resistensi dalam Novel Hulubalang Raja Karya Nur Sutan Iskandar: Kajian Poskolonial. *Jurnal Salaka : Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.33751/jsalaka.v2i2.2485>
- Darwis, Y. (2013). *Sejarah Perkembangan Pers Minangkabau (1859-1945)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Faruk, F. (1986). *Novel Sejarah dalam Sastra Indonesia Modern*. Retrieved from [https://drive.google.com/file/d/155COnPHddX5qkhuN7hebzFyiOKt1u3\\_q/view](https://drive.google.com/file/d/155COnPHddX5qkhuN7hebzFyiOKt1u3_q/view)
- Foulcher, K. (2008). Larut di Tempat yang Belum Terbentuk: Mimikri dan Ambivalensi dalam “Sitti Noerbaja” Marah Roesli. In K. Foulcher, T. Day, & K. S. Toer (Eds.), *Sastra Indonesia Modern: Kritik Postkolonial* (Rev Clearing a Space). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Graves, E. E. (2007). *Asal Usul Elite Minangkabau Modern Respon Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hall, K. R., & Reid, A. (1994). Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power, and Belief. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 37(3). <https://doi.org/10.2307/3632261>
- Hartono, H. (2015). Mimikri Pribumi Terhadap Kolonialisme Belanda Dalam Novel Sitti Nurbaya Karya Marah Rusli (Kajian Postkolonialisme). *Diksi*, 12(2). <https://doi.org/10.21831/diksi.v12i2.5267>
- Hefner, R. W. (2017). Introduction Multiculturalism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia. In *The Politics of Multiculturalism* (pp. 1–58). <https://doi.org/10.1515/9780824864965-002>
- Jedamski, D. (1992). Balai Pustaka : A Colonial Wolf in Sheep’s Clothing. *Archipel*, 44(1). <https://doi.org/10.3406/arch.1992.2848>
- Johns, A. H. (1959). The Novel as a Guide to Indonesian Social History. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 115(3), 232–248. <https://doi.org/10.1163/22134379-90002236>
- Kuncorowati, P. W., Widiastuti, S., & Nurhayati, I. (2018). Usaha perantau Minangkabau di Kota Yogyakarta dalam membina hubungan dengan kerabat asal. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 26–36. <https://doi.org/10.21831/jc.v15i1.16087>
- Kuntowijoyo. (2004). Sejarah / Sastra. *Humaniora*, 16(1), 17–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jh.803>
- Labrousse, P. (1982). Le Tombeau de “Sitti Nurbaya”. Essai de lecture sociale. *Archipel*, 23(1). <https://doi.org/10.3406/arch.1982.1731>
- Lionar, U., Mulyana, A., & Yulifar, L. (2020). Plakat Panjang Hingga Perang Kamang: Gerakan Rakyat Minangkabau Menentang Pajak Kolonial Belanda. *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2).
- Masyitah, M., Ibrahim, B., & Melay, R. (2019). Peristiwa Perang Kamang Tahun 1908 (Gerakan Rakyat Kamang Terhadap Belanda). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 6(1).
- Mulyani, Y. (2010). Nasionalisme dalam Siti Nurbaya Karya Marah Rusli. *Jurnal Sosioteknologi*, 9(19). Retrieved from <https://journals.itb.ac.id/index.php/sostek/article/view/1042>
- Nashir, H. (2008). Purifikasi Islam dalam Gerakan Padri di Minangkabau. *Unisia*, 31(69). <https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss69.art1>
- Purwanto, B. (2001). Historisisme Baru dan Kesadaran Dekonstruktif: Kajian Kritis Terhadap Historiografi Indonesiasentris. *Humaniora*, 13(1). Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/709>
- Putra, Y. S. (2010). Politik Pencitraan dan Polemik Sosial-Politik Minangkabau dalam Perspektif Karya Sastra. *Jurnal Elektronik WACANA ETNIK*, 1(2). <https://doi.org/10.25077/we.v1.i2.60>



- Radjab, M. (1969). *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*. Padang: Center for Minangkabau Studies.
- Ricklefs, M. C. (2011). *Sejarah Indonesia Modern* (D. Hardjowidjono, ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Roesli, M. (2011). *Sitti Nurbaya (Kasih Tak Sampai)* (Empat Puluh Tujuh). Jakarta: Balai Pustaka.
- Sanusi, I. (2018). Kolonialisme dalam Pusaran Konflik Pembaharuan Islam: Menelusuri Keterlibatan dan Peran Belanda dalam Keberlangsungan Konflik yang Terjadi di Minangkabau. *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta'limat, Budaya, Agama Dan Humaniora*, 22(1). <https://doi.org/10.37108/tabuah.v22i1.18>
- Stark, A., & Huszka, B. (2022). 100 Years Sitti Nurbaya: A View on the Social Criticism in the Novel Sitti Nurbaya. *Asian Culture and History*, 14(1), 67. <https://doi.org/10.5539/ach.v14n1p67>
- Teeuw, A. (1967). *Modern Indonesian Literature*. <https://doi.org/10.1007/978-94-015-0768-4>
- Tickell, P. (2008). Cinta di Masa Kolonialisme: Ras dan Percintaan dalam Sebuah Novel Indonesia Awal. In K. Foulcher, T. Day, & K. S. Toer (Eds.), *Sastra Indonesia Modern: Kritik Postkolonial* (Rev Clearing a Space). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- 
- 1 Harta kepemilikan dari sekelompok keluarga berupa tanah ataupun ladang yang diwariskan secara matrilineal (dari nenek ke ibu kemudian ke anak perempuannya).
  - 2 Saudara laki-laki ibu tertua sebagai pengelola harato pusako tinggi.
  - 3 Nagari merupakan wilayah administrative terendah pada sistem pemerintahan di Minangkabau.
  - 4 Pajak yang didapat atas penghasilan perusahaan atau penghasilan-penghasilan lainnya.